

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun oleh:

FAJAR BAIHAQY

21701082223



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2021

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis sistem akuntansi keuangan daerah pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten Bangkalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Teknik pengambilan data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dari penelitian ini ialah editing, klasifikasi dan verifikasi, teknik analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini ialah sistem akuntansi keuangan yang meliputi penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, pengakuan belanja dan beban serta pengukuran belanja dan beban pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten Bangkalan telah sesuai peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2020. Sedangkan pencatatan belanja dan beban pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten bangkalan belum sesuai dengan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2020.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Akuntansi Keuangan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

This study aims to find out about the analysis of the regional financial accounting system at the community empowerment agency and village government of Bangkalan district. This research is a qualitative research using the type of research that produces descriptive data in the form of written words. Data collection techniques were obtained by conducting observations, interviews and documentation. The data processing technique of this research is editing, classification and verification, the data analysis technique is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study are the financial accounting system which includes cash receipts, cash disbursement systems, recognition of expenditures and expenses as well as measurement of expenditures and burdens on community empowerment and the village government of Bangkalan district has been in accordance with regional regulations No. 12 of 2020. While recording expenditures and expenses on empowerment The community and village government of Bangkalan Regency have not complied with regional regulation Number 12 of 2020.

Keywords: Accounting System, Regional Financial Accounting, Community Empowerment Agency and Village Government.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai otonomi daerah. Reformasi tata kelola keuangan negara/daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat, yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi daerah memegang peranan penting agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kurangnya informasi menyebabkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik (Mokoginta dkk, 2020:874).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2020 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Moginta dkk, 2020:875).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020, sistem keuangan pemerintah daerah meliputi: (a) prosedur penerimaan kas, (b) prosedur akuntansi pengeluaran kas, (c) prosedur akuntansi asset tetap/ barang milik daerah, (d) prosedur akuntansi selain kas. Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku saat ini harus sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Ratmono dkk (2017:58) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Chabibah, (2019:18) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat di definisikan sebagai berikut: “Serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang dapat menghasilkan laporan yang relevan dan tepat waktu, yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi”.

Menurut Chabibah, (2019:19) Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan: “tata cara mulai dari proses data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”. Tujuan sistem akuntansi keuangan daerah

adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantunya. Dan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan yang berlaku (Ardana, 2020:1).

Dengan penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan segala aktifitas instansi dapat dijalankan dengan efisien sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem keuangan yang dimaksud adalah suatu sistem akuntansi keuangan yang diterapkan secara menyeluruh. Sistem akuntansi keuangan di sebuah instansi pemerintahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dapat

digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan (Dewi, 2020: 111).

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban dan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah berlaku umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Peneliti menganggap bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat penting dan dibutuhkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Untuk itu penelitian ini diberi judul **“Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah :

Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

a. Manfaat teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah.

b. Manfaat praktis

1. Bagi penulis, dapat memberikan media pembelajaran ilmu pengetahuan dan menambah wawasan informasi untuk peneliti sendiri dan para pembaca tentang sistem akuntansi keuangan daerah pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten Bangkalan.
2. Bagi pemerintah, sebagai masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan sistem akuntansi.
3. Bagi akademis, dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi para akademis dan ilmuwan di perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk kepentingan penelitian.

4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang sistem akuntansi keuangan daerah dan diharapkan menjadi salah satu wawasan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang dilakukan pada kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bangkalan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan meliputi:

1. Sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, pengakuan belanja dan beban serta pengukuran belanja dan beban telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020.
2. Sistem pencatatan belanja dan beban belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan peneliti dalam pengambilan data pendapatan atau pengeluaran (PAD) yang kurang optimal.

5.3 Saran

Dari kesimpulan diatas, untuk mencapai sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan di BPMPD lebih maksimal ditahun-tahun yang akan datang dan untuk merumuskan kebijakan teknis penyusunan

program, penelitian dan pengelolaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka harus ada pembenaran beberapa hal, maka penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dioptimalkan kembali datanya agar bisa diakses secara online sebagai hasil laporan pertanggungjawaban.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Thania Putri. (2020). *Analisis Implementasi Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Chabibah, Fitri. (2019). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM), dan Audit Internal Terhadap Kualitas Saji Laporsn Keuangan Pemerintah Daerah Batu*. Skripsi UIN Malang.
- Darise, Nurian. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta. Indeks.
- Dewi, Cok Istri R. S., Surya, Luh Putu L. S., Yudha, Cokorda K. (2020). *Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak Dan Kejelasan Tujuan Terhadap Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung)*
- Erlina dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat*, Jakarta: Salemba Empat.
- Harini, Dwi., Riono, S. B., Syaifulloh, M. (2020). *Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes*. Universitas Muhadi Setiabudi. Vol. 2.
- Moh. Mahsun, Firma S., dan Heribetus A. P. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Mokoginta, Lambey & Pontoh. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal Riset Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi. Vol 12(2). 874-890.
- Mulyadi. (2018). *Sistem Akuntansi*. Edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddy. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Dua, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah (PERDA) No. 12 Tahun 2020 Tentang *Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan*, 2020. Kabupaten Bangkalan.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*, 2010. Yogyakarta: Jogloabang

- Pernandes, R. (2018). *Analisis Penerapan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Universitas Pasir Pengairan. Vol. 13, No. 2.
- Ratmono, Dwi dan Solihin, Mahfud. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sari, Winda Puspita. (2011). *Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang*. Skripsi Universitas Andalas.
- Soemantri, Bambang.T. (2011). *Buku Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa*. Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 7, No. 1.
- Tanjung, Hafiz Abdul. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD*. Edisi Pertama, Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Rian. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Di Kabupaten Musi Banyuasin*. Skripsi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Zeyn, Elvira. (2011). *Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol.1 No.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. 2014. Jakarta: Salinan Putusan. LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL Setneg: 65 Hlm.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. 2014. Jakarta: Salinan Putusan. LN.2003/No.47, TLN No.4286, LL Setneg : 20 Hlm